Komunisme di Indonesia

PKI juga merupakan partai komunis yang paling dekat dan mendapat sokongan penuh dari Presdien Pertama RI, yaitu Sukarno. PKI benar-penar memiliki kekuatan penuh, pada saat itu seperti bunuh diri jika ingin membubarkan PKI.

Dibalik Kekejaman PKI

Peristiwa PKI

Penumpasan Partai Komunis

Setelah Peristiwa PKI

Wikipedia

Pada bulan Juli 1959 parlemen dibubarkan dan Sukarno menetapkan konstitusi di bawah dekret presiden – sekali lagi dengan dukungan penuh dari PKI.

PKI menyambut "Demokrasi Terpimpin" Sukarno dengan hangat dan anggapan bahwa dia mempunyai mandat untuk persekutuan Konsepsi yaitu antara Nasionalis, Agama dan Komunis yang dinamakan [NASAKOM](https://id.wikipedia.org/wiki/NASAKOM" \o "NASAKOM).

Latar Belakang

Pada era “Demokrasi Terpimpin”, kepemimpinan PKI dan kaum burjuis nasional gagal juga dalam memecahkan masalah politik dan ekonomi negara. Alhasil pendapatan ekspor menurun, cadang devisa menurun, inflasi terus menaik dan terjadi banyak korupsi birokrat. Akibatnya demonstrasi terjadi dimana-mana dari kalangan buruh, petani dan mahasiswa

Rencana Kudeta

Percobaan kudeta tersebut berhasil digagalkan dan tersebar isu yang menyatakan bahwa PKI bertanggung jawab dibalik peristiwa pada 30 September yang telah menelan banyak nyawa. Sampai saat ini kebenaran apakah PKI terlibat atau tidak pada 30 September 1965 masih menjadi bahan perdebatan.

Pada awal tahun 1965 Presiden Sukarno atas saran dari PKI memutuskan mendirikan Angkatan Kelima (setelah AURI, ALRI, ADRI, dan Kepolisian) dan terlepas dari ABRI. Angkatan Kelima didirikan untuk pertahanan dan keamanan Republik Indonesia, Angkatan Kelima ini diambil dari kalangan buruh dan petani yang sudah dilatih.

Keputusan ini menimbulkan konflik yang semakin memanas, karena ABRI tidak setuju dan mencurigai PKI hendak melakukan kudeta pada Presiden Sukarno. Hal ini menimbulkan fikiran saling curiga-mencurigai antara militer dan PKI dan ini merupakan salah satu penyebab insiden Gerakan 30 September.

Selain itu sebelum di dirikannya angkatan kelima, sejak tahun 1963 PKI semakin memperparah keadaan dengan terus provokasi konflik antara aktivis massanya dengan polisi dan militer. Saat itu kebencian karena perbedaan kelompok antara polisi, tentara dan rakyat semakin mewabah. Pada tahun 1964 sampai dengan awal tahun 1965 terjadi benturan antara polisi, petani dan para pemilik tanah disebabkan hasutan PKI kepada ribuan petani bahwa seluruh petani berhak atas segala tanah milik negara, karena milik negara sama dengan milik bersama. Selain itu para buruh juga menyita perusahaan-perusahaan dan minyak milik asing, terutama milik Amerika Serita.

Atas segala bentrokan yang terjadi, para sejarahwan menduga bahwa PKI seperti meniru revolusi Bolsevik yang terjadi di Rusia, revolusi yang membuat rakyat dan partai komunis menyita milik Tsar dan membagi-bagikannya kepada rakyat.

Kepemimpinan PKI menjawab semua tuduhan padanya dengan memasuki pemerintahan dengan duduk bersama disebelah para petinggi militer dan menyatakan bahwa angkatan bersenjata merupakan bagian dari revolusi demokratis “rakyat”

Penculikan Para Jenderal

Penumpasan Pemberontakan

Historia.id

Film Pengkhianatan G30S/PKI dan Fakta Sejarah

### **Setidaknya, ada lima ketidaksesuaian antara materi yang dikisahkan film G30S/PKI dengan fakta sejarah sebenarnya.**

PADA era Orde Baru (Orba), tiap tanggal 30 September, stasiun televisi nasional TVRI selalu menayangkan film Pengkhianatan G30S/PKI. Saat kali pertama rilis pada 1984, film ini bahkan wajib ditonton oleh para siswa SD (Sekolah Dasar), SMP (Sekolah Menengah Pertama) dan SMA (Sekolah Menengah Atas) di seluruh Indonesia.

Sejak Presiden Soeharto lengser pada 1998, film garapan Arifin C Noer itu berhenti ditayangkan TVRI. Itu terjadi atas desakan sebagian kalangan masyarakat dan pihak TNI AU, yang menganggap film itu tidak sesuai dengan kejadian sebenarnya. Setidaknya, ada beberapa adegan di film itu yang berlawanan dengan fakta sejarah.

## **DN Aidit Perokok**

Dalam suatu adegan pada film tersebut, digambarkan sosok pemimpin CC PKI (Comite Central Partai Komunis Indonesia), sebagai seorang perokok. Padahal kenyataannya Aidit bukan bukan seorang pecandu tembakau.

Alih-alih menggilai rokok, Aidit justru menganjurkan kawan-kawannya untuk meminimalisir rokok demi kesehatan finansial partainya. Dalam isi "Resolusi Dewan Harian Politbiro CC PKI" tertanggal 5 Januari 1959, Aidit menyerukan teman-temannya untuk menghentikan kebiasaan merokok atau setidaknya mengurangi ketergantungan pada rokok. Aidit mengatakan akan lebih bermanfaat jika uang untuk membeli rokok, dialihkan untuk dana Kongres ke-6 PKI.

Murad Aidit, adik DN Aidit, mengatakan bahwa dalam keluarga kami tak ada yang merupakan pecandu rokok. Begitu pula ayah kami pun tak pernah atau jarang sekali merokok. "Dalam film itu diperlihatkan seolah-olah DN Aidit merupakan pecandu rokok yang hebat. Aku dan teman-temanku selalu tersenyum kalau melihat adegan ini, karena DN Aidit merupakan orang yang tak pernah merokok," kata Murad dalam Aidit Sang Legenda.

**BACA JUGA: [Wawancara DN Aidit: "PKI menentang pemretelan terhadap Pancasila"](http://historia.id/modern/articles/wawancara-dn-aidit-quot-pki-menentang-pemretelan-terhadap-pancasila-quot-DLLWd)**

## **Perlakuan Bengis terhadap Para Jenderal**

Secara gamblang, film Pengkhianatan G30S/PKI melukiskan bagaimana para perwira tinggi Angkatan Darat (AD) yang diculik ke Lubang Buaya, digambarkan mengalami penyiksaan hebat. Tubuh mereka disayat-sayat dan diperlakukan secara biadab, sebagaimana dideskripsikan diorama yang terpampang di kompleks Monumen Pancasila Sakti, Jakarta.

Bisa jadi, gambaran itu terinspirasi dari laporan-laporan berita yang dimuat Berita Yudha pada 9 Oktober 1965. Koran milik tentara itu bahkan menyebut tentang para jenderal yang dicukil matanya serta alat-alat kelamin mereka dipotong oleh para aktivis Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani), sebuah organ perempuan yang menjadi bagian dari PKI.

Kenyataanya tidak seperti itu. Dalam laporan visum et repertum yang didapat sejarawan Ben Anderson dan diungkapkan dalam "How did the General Dies?" jurnal Indonesia, April 1987, disebutkan bahwa keadaan jenazah hanya dipenuhi luka tembak.

**BACA JUGA: [Ben Anderson, Pakar Asia Tenggara Penutur Banyak Bahasa](http://historia.id/persona/articles/ben-anderson-pakar-asia-tenggara-penutur-banyak-bahasa-v27jw)**

Dari hasil visum yang dilakukan tim yang terdiri dari dr. Lim Joe Thay, dr. Brigjen Rubiono Kertopati, dr. Kolonel Frans Pattiasina, dr. Sutomo Tjokronegoro dan dr. Liau Yan Siang itu dijelaskan tidak ada bekas penyiksaan seperti penyiletan, pemotongan alat kelamin atau pencungkilan mata. Semua organ tubuh para perwira tinggi AD itu utuh sama sekali.

## **Bung Karno Jatuh Sakit**

Di film itu Presiden Sukarno dikisahkan tengah sakit keras. Bung Karno (yang diperankan oleh Umar Khayam) juga digambarkan selalu berjalan bolak-balik layaknya orang yang tengah kebingungan. Fakta sejarah yang sebenarnya Bung Karno kala itu sehat-sehat saja. Memang sempat ada isu beredar bahwa Bung Karno sedang sakit keras, namun kehadiran Si Bung dalam sejumlah kegiatan seremonial (seperti pembukaan Musyawarah Nasional Teknik di Istora Senayan Jakarta pada 30 September 1965) menafikan isu itu lebih jauh beredar.

Bung Karno baru benar-benar sakit setelah dijadikan tahanan rumah di Wisma Yaso, Jakarta. Perawatan yang tidak intensif membuatnya tutup usia pada Juni 1970.

**BACA JUGA: [Sukarno Meninggal Dunia](http://historia.id/persona/articles/sukarno-meninggal-dunia-P1B3K)**

## **Tarian Aktivis Gerwani**

Salah satu adegan yang paling banyak diingat khalayak dari film itu adalah adanya "pesta besar" di Lubang Buaya lengkap dengan tarian-tarian erotis para aktivis Gerwani. Menurut penelitian Saskia Elionora Wieringa, sejatinya penggambaran itu merupakan sebentuk propaganda yang dilakukan oleh media-media cetak milik tentara yakni Berita Yudha dan Harian Angkatan Bersenjata.

Dalam penelitian yang kemudian dibukukan berjudul Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia, Saskia mengungkapkan bahwa Gerwani sendiri, walau punya kaitan yang sangat dekat dengan PKI, tidak terlibat langsung dalam tragedi tersebut.

Dalam kesaksian Suharti, salah satu eks Gerwani yang dituliskan Saskia, Gerwani sejak awal 1965 memang sering berada di Lubang Buaya bersama sejumlah organisasi pemuda lain. Termasuk pemuda Nahdlatul Ulama (NU), Perwari, Wanita Marhaen, Wanita Islam dan Muslimat, untuk pelatihan dalam rangka persiapan konfrontasi dengan Malaysia.

Pun begitu dengan kesaksian Serma Bungkus, eks anggota Resimen Tjakrabirawa yang penculik para jenderal. Dalam buku Gerakan 30 September, Antara Fakta dan Rekayasa: Berdasarkan Kesaksian Para Pelaku Sejarah, Bungkus menyatakan bahwa tidak ada tarian atau pesta yang diiringi nyanyian-nyanyian di Lubang Buaya.

**BACA JUGA: [Tujuh Tahanan Politik Perempuan di Kamp Plantungan](http://historia.id/modern/articles/tujuh-tahanan-politik-perempuan-di-kamp-plantungan-PGjL7)**

## **Peta di Ruang Kostrad**

Ada pemandangan "unik" dan membingungkan dalam adegan yang menggambarkan Letnan Jenderal TNI Soeharto tengah memimpin operasi pemulihan keamanan pasca-terjadinya G30S di ruangan Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad).

Adalah peta Indonesia di ruangan tersebut jadi penyebabnya karena sudah memasukkan Timor Timur sebagai wilayah Indonesia. Sejarawan Asvi Warman Adam dalam Membongkar Manipulasi Sejarah: Kontroversi Pelaku dan Peristiwa menuliskan bahwa tahun 1965/1966 Timor Timur belum terintegrasi ke dalam NKRI. “Jadi peta yang ada di sana bersifat anakronis,” ujar Asvi.

# Soe Hok Gie dan Tentara

### **Soe Hok Gie mamandang politik sebagai lumpur yang kotor. Namun demi menjatuhkan rezim Sukarno, dia terpaksa terjun ke dunia politik dan membina aliansi dengan militer.**

RUDY BADIL masih ingat kata-kata sobatnya, Soe Hok Gie. Suatu hari, aktor intelektual gerakan mahasiswa 1966 itu bilang bahwa politik merupakan dunia yang sangat dihindarinya. Kalaupun pada akhirnya dia ada di dunia politik, Soe meyakinkan bahwa itu adalah jalan terakhir yang terpaksa harus diambilnya karena jalan yang lain sudah tertutup.

“Orang lurus macam dia memang tak cocok ada di dunia politik,” ujar mantan jurnalis senior itu kepada *Historia*.

Soe memang pernah mengungkapkan hal tersebut dalam catatan hariannya yang dibukukan berjudul *Catatan Seorang Demonstran*. Pada 16 Maret 1964, dia menulis bahwa politik adalah barang paling kotor, lumpur-lumpur kotor yang di dalamnya sama sekali tak mengenal moral.

“Tetapi suatu saat di mana kita tak dapat menghindari lagi maka terjunlah … Dan jika sekiranya saatnya sudah sampai aku akan ke lumpur ini,” ungkapnya.

**BACA JUGA: [Soe Hok Gie dan para penyusup di Universitas Indonesia](http://historia.id/modern/articles/soe-hok-gie-dan-para-penyusup-di-ui-PRygQ)**

Namun apa yang dihindari Soe ternyata harus terjadi juga. Ketika kekuatan politik Presiden Sukarno semakin menguat pada pertengahan 1960-an, dia tak menemukan cara lain untuk meruntuhkannya selain bekerja sama dengan tentara (Angkatan Darat).

“Yang penting ialah mendapatkan kekuatan yang diperlukan, sebab jika kita tak memelihara kekuatan dan hanya studi terus, kita akan disapu bersih oleh grup lawan,” kata Soe Hok Gie.

## Aliansi Mahasiswa-Tentara

Sejak meyakini gerakan mahasiswa tidak akan berhasil meruntuhkan kekuasaan Presiden Sukarno tanpa kekuatan politik lain, Soe mulai melihat tentara (baca: Angkatan Darat) sebagai mitra yang potensial. Menurut Daniel Dhakidae dalam "Soe Hok Gie Sang Demonstran", kata pengantar untuk Catatan Seorang Demonstran, hubungan Soe dengan tentara bisa terwujud karena jasa Nugroho Notosusanto, seniornya di Fakultas Sastra jurusan sejarah Universitas Indonesia.

Lewat Nugroho yang juga kepala Pusjarah ABRI (Pusat Sejarah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia), Soe membangun jaringan dengan Kolonel Suwarto, komandan SSKAD (Sekolah Staf Komando Angkatan Darat). Siapakah sebenarnya Suwarto? Menurut Anton Ngenget (eks agen CIA dan KGB di Indonesia), Suwarto adalah seorang tentara yang memiliki kecenderungan politik kepada Barat.

“Saya tahu persis, dia pro-Amerika,” ungkap Anton dalam *DeTAK Files: Siapa Sebenarnya Soeharto?* suntingan Eros Djarot dkk.

**BACA JUGA: [Sang Demonstran dan politikus berkartu mahasiswa](http://historia.id/modern/articles/sang-demonstran-dan-politikus-berkartu-mahasiswa-vooRN)**

Soe juga merintis hubungan ke beberapa perwira Kodam Siliwangi yang anti-Sukarno. Lewat Suripto (eks aktivis mahasiswa Bandung yang bekerja di Komando Operasi Tertinggi), Soe bisa mengenal Brigadir Jenderal TNI Kemal Idris, kepala staf Kostrad, dan Brigadir Jenderal TNI Yoga Sugama, perwira intelijen Komando Operasi Tertinggi.

“Soe sering berunding dengan Suripto di kawasan Senayan,” ujar John Maxwell dalam disertasinya Soe Hok Gie: A Biography of A Young Indonesian Intellectual (diterjemahkan menjadi Soe Hok Gie: Pergulatan Intelektual Muda Melawan Tirani).

Hubungan baik dengan para perwira anti-Sukarno itu terbukti banyak gunanya bagi gerakan mahasiswa yang sedang berupaya meruntuhkan kekuasaan Sukarno. Bukan saja sumbangan materi, namun juga back up keamanan dalam setiap demonstrasi anti-Sukarno.

“Di sekeliling mahasiswa sudah disediakan RPKAD preman. Merekalah yang akan menghadapi tukang-tukang pukul dan orang-orang bayaran dari kaum ASU-Soebandrio-Chairul Saleh,” tulis Soe dalam catatan hariannya.

**BACA JUGA: [Prabowo Subianto di mata Soe Hok Gie](http://historia.id/modern/articles/prabowo-di-mata-soe-hok-gie-vqj9K)**

Menurut Maxwell, banyak aktivis mahasiswa yang sering berkumpul di Senayan (kediaman Suripto) mendapat akses dan diizinkan menumpang kendaraan militer sehingga mereka bisa menghindari jam malam. Bahkan ada beberapa aktivis mahasiswa yang dibekali senjata, termasuk Soe Hok Gie.

“Dia pernah membawa pistol kaliber FN 9 mm di dalam ranselnya,” tulis Daniel Dhakidae dalam “Sekali Lagi Soe Hok Gie,” Sinar Harapan, 8 Januari 1970. Daniel mengutip pernyataan Boeli Londa, sahabat Soe.

Sejarah mencatat, aliansi mahasiswa-tentara itu berbuah manis. Sukarno yang berkuasa selama 22 tahun sejak 1945, akhirnya berhasil ditumbangkan untuk menerbitkan rezim Orde Baru di bawah Jenderal TNI Soeharto.

## Mengatur Jarak

Kemenangan grup tentara anti-Sukarno disambut hangat oleh sebagian besar tokoh KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia). Tetapi tidak oleh Soe Hok Gie. Alih-alih merasa lega, dia justru mewaspadai munculnya “tendensi militerisme dan fasistis” dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia. Soe lantas mengatur jarak dengan tentara.

Jopie Lasut, rekan Soe sesama aktivis anti-Sukarno, memiliki cerita sendiri terkait gelagat tersebut. Alkisah pada 15 Maret 1966, Jopie dan Soe diminta oleh mahasiswa Jakarta untuk mengonfirmasi sebuah info intelijen penting dari telik sandi Kudjang (kesatuan khusus Kodam Siliwangi) kepada dua perwira Siliwangi anti-Sukarno: Mayor Jenderal TNI H.R. Dharsono dan Brigadir Jenderal TNI Suwarto di Bandung. Dalam pertemuan itu, sambil lalu Dharsono menanyakan tentang situasi Jakarta dan bagaimana kira-kira pendapat KAMI mengenai “kerja sama setara” antara ABRI-Mahasiswa.

“Kami datang ke sini bukan sebagai wakil formil dari KAMI. Namun sepanjang sepengetahuan saya, para mahasiswa tidak akan mempertahankan kerja sama dengan ABRI kalau jenderal-jenderalnya masih hidup bermewah-mewahan,” ujar Soe seperti dikisahkan Jopie Lasut dalam Soe Hok Gie, Sekali Lagi suntingan Rudy Badil, dkk.

**BACA JUGA: [Soe Hok Gie menyoal gerakan mahasiswa yang saling berlawanan](http://historia.id/modern/articles/kisah-kiri-melawan-kanan-PdjWg)**

Mendengar jawaban Soe, air muka Dharsono langsung berubah. Sebaliknya Suwarto malah tertawa. Sambil melirik ke arah Dharsono, dia kemudian bilang: “Ya..., tapi jangan dimasukan jenderal-jenderal seperti kami dong. Kami masing-masing hanya memiliki satu mobil pribadi yang kami bawa dari luar negeri. Itu pun untuk modal penyambung hidup,” ungkap perwira yang mendukung terbentuknya Radio Ampera UI tersebut.

Selanjutnya sikap Soe semakin jelas terhadap tentara. Terlebih saat dia mulai melakukan kritik-kritik pedasnya terhadap pembantaian massal orang-orang PKI yang salah satunya melibatkan tentara. Sejak saat itulah langkah Sang Demonstran semakin jauh dari markas tentara.

Tirto.id

Membedah Film 'Pengkhianatan G30S/PKI'  
  
Baca selengkapnya di artikel "Membedah Film 'Pengkhianatan G30S/PKI'", <https://tirto.id/cxxh>

Dalam sejarah sinema dunia, film propaganda adalah bagian strategi kebudayaan untuk gagasan-gagasan politik tertentu. Tak sedikit dari film propaganda dibuat oleh sutradara-sutradara andal dengan karya-karya hebat dan terus-menerus dipelajari secara akademis, sebut saja Leni Riefenstahl (Jerman), Sergei Eisenstein (Rusia), dan Mikhail Kalatozov (Rusia). Indonesia-nya Orde Baru juga doyan memakai film sebagai alat propaganda politik. Ada banyak film perjuangan yang jadi tontonan wajib bagi siswa, sebagian besar tentang kehebatan perjuangan rakyat Indonesia terutama militer dalam mempertahankan revolusi. Pada 1980-an hingga 1990-an, Departemen Penerangan Republik Indonesia—melalui Pusat Produksi Film Negara (PPFN)—merupakan lembaga yang bertanggung jawab memproduksi film-film propaganda politik rezim Orde Baru dengan sokongan cukup besar dana. Salah satunya yang legendaris adalah Pengkhianatan G 30S PKI yang disutradarai Arifin C. Noer dan diproduksi oleh PPFN pada 1984. Seluruh stasiun televisi wajib menayangkan film yang mengisahkan penculikan terhadap tujuh jenderal (atau “Dewan Jenderal”) pada subuh 1 Oktober 1965. Penayangan baru dihentikan pada masa pemerintahan Habibie, melalui Menteri Penerangan Yunus Yosfiah, pada 1998. TNI-Angkatan Udara juga dikabarkan keberatan atas kebijakan penayangan karena film itu mengimplikasikan keterlibatan AU. Baca juga: Mempropagandakan Film Seram 'G30S PKI' Film 'G30S' yang Dianggap Narasi Sejarah oleh TNI & Sekolah Terlepas dari misi propaganda yang dibawa dalam G30S, banyak temuan menarik di pelbagai adegan dan menurut saya adalah capaian puncak bahasa film—tentu saja dengan tidak melepaskan konten propaganda di dalamnya. Tersusun Dua Bagian Pengkhianatan G30S PKI terdiri dua bagian. Pertama mencakup latar belakang peristiwa, rencana kudeta, dan penculikan para jenderal. Kedua meliputi kisah penumpasan pemberontakan. Bagian pertama menggambarkan para penculik (PKI, Pemuda Rakyat, dan Gerwani) melakukan kekejaman terhadap para korban. Sosok Mayor Jenderal Soeharto mulai dimunculkan pada bagian kedua sebagai sosok penumpas dan pembongkar konspirasi di belakang penculikan, selain digambarkan memimpin evakuasi jenazah para korban penculikan. Ditulis dengan plot dan gaya bahasa yang berbeda, setiap bagian menempatkan tokoh-tokoh utama dalam bahasa visual yang berbeda pula. Sukarno, misalnya, selalu ditampilkan sebagai sosok yang gagah, berwibawa, intelektual, dan terpelajar—dapat dilihat pada bagian pertama pada saat digambarkan sakit dan kesehariannya yang tidak lepas dari buku. Arifin selalu menghadirkan presiden pertama RI ini dengan low-angle shot agar sosok Sukarno tampak tinggi besar. Film ditutup dengan kemenangan Pancasila sebagai ideologi negara dan suara rekaman asli Jenderal A.H. Nasution saat prosesi pemakaman korban. Dua bagian ini secara sangat sadar ditulis oleh Arifin. Syam Kamaruzaman, dalam film ini adalah koordinator lapangan penculikan, digambarkan tegas, bengis, percaya diri, dan perokok berat. Arifin menggambarkan tokoh ini tidak lepas dari asap yang mengepul dari mulutnya. Beberapa dialog pada bagian pertama dihadirkan dalam bingkai-bingkai extreme close-up. D.N. Aidit digambarkan sebagai tokoh ambisius, gila kekuasaan, dengan kepercayaan diri yang tinggi. Kolonel Untung, komandan pasukan Cakrabirawa yang memimpin penculikan, digambarkan selalu gamang pada pilihan politiknya. Terakhir, tokoh Soeharto yang digambarkan sosok yang tenang, berwibawa, dan penuh kesantunan. Temaram, Voyeuring, dan Sejarah Gelap Dengan konstruksi bahasa visual sangat terukur pada tiap adegan, Arifin C. Noer paham sepenuhnya bahwa G30S merupakan propaganda. Ia tahu cara memvisualkan teori konspirasi yang disebarluaskan oleh Orde Baru. G30S dibuka dengan pernyataan tegas tentang makna pengorbanan dan perjuangan yang tertulis di monumen Lubang Buaya. Sebuah kalimat yang dibacakan oleh beberapa orang secara bersamaan, yang membangun imaji tentang suara orang yang dikubur di sumur Lubang Buaya: “Cita-cita perjuangan kami untuk menegakkan kemurnian Pancasila tidak mungkin dipatahkan hanya dengan mengubur kami dalam sumur ini’— Lubang Buaya, 1 Oktober 1965.” Setelah pernyataan pembuka, dalam suasana gelap dan temaram, kaki-kaki melangkah, diikuti pemandangan orang-orang yang sedang salat Subuh di sebuah masjid. Kamera menyorot ke langit gelap. Setelah sunyi sejenak, terjadilah penyerangan terhadap jemaah salat Subuh dan perusakan kitab suci. Suara narator lantas menerangkan pelbagai peristiwa kekerasan oleh aktivis PKI dan organ-organ terafiliasi di Jawa. Narator juga menjelaskan intrik-intrik politik di kalangan elite pada masa itu: Presiden Sukarno sakit-sakitan di tengah isu persaingan di Angkatan Darat yang diembuskan oleh PKI. Pada bagian pertama, yang paling menarik adalah adegan-adegan konspirasi elite PKI dari persiapan hingga pelaksanaan penculikan. Hampir semua adegan rapat dan dialog antar-tokoh selalu dibuat sangat detail dengan penonjolan karakter-karakter penculik. Suasana visual pada bagian pertama ini begitu temaram, gelap, dan tersembunyi di antara ingar-bingar Jakarta. Arifin sangat berhati-hati dalam menggunakan dialog, yang dibatasinya pada tiap-tiap tokoh, sebagai representasi visual atas “teori” Orde Baru. Tokoh-tokoh di belakang layar ini hanya mengeluarkan kata-kata kunci menurut versi Orde Baru yang melatarbelakangi Gerakan 30 September. Syam Kamaruzaman dalam sebuah rapat, misalnya, hanya berkata: “Inilah saatnya kita merebut kekuasaan. Kita harus mendahului, jangan didahului.” Adegan itu lebih banyak bermain dalam ranah visual. Suasana keseharian di sebuah rumah tetap digambarkan oleh sutradara dengan detail-detail perabotan dalam rumah, lampu, kursi, pajangan di dinding, buku-buku, dan ekspresi orang-orang di sana; gelas-gelas kopi, rokok, dan istri yang melayani para tamu. Menariknya, rangkaian adegan di bagian pertama ini dibuat begitu cair, tanpa pretensi berlebihan, untuk menggambarkan sebuah kelompok yang mempersiapkan kudeta. Pada beberapa dialog, Arifin memakai bingkai-bingkai extreme close-up untuk menebalkan efek kepulan asap rokok dari mulut para penculik. Setiap karakter yang diposisikan sebagai tokoh sentral selalu memegang rokok, yang saat-saat tertentu ditampilkan begitu ekstrem. Tokoh D.N. Aidit, misalnya, digambarkan tidak pernah lepas dari rokok bahkan ketika memimpin rapat, begitu juga saat di rumah persembunyian. Dalam G30S, mengisap rokok dalam-dalam merepresentasikan gambaran orang berpikir keras saat menghadapi situasi pasca penculikan. Pada titik ini Arifin sadar betul bahwa tokoh-tokoh ini adalah para pemikir. Secara terselubung, sangat jelas, ia mencoba menggambarkan orang-orang ini bukanlah para pembunuh picisan, tetapi para intelektual. Adegan merokok ini juga ditampilkan pada karakter Soeharto. Pada bagian kedua, tergambar Soeharto berpikir keras menghadapi kemelut politik, Arifin menggambarkannya duduk di sisi jendela kantor—markas Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat—sambil mengisap rokok. Selain rokok, kopi juga cukup mencolok di bagian pertama. Dalam suasana rapat yang temaram, kopi seakan jadi distribusi informasi di antara masing-masing karakter sekaligus pengisi kekosongan dialog. Sementara karakter Soeharto digambarkan tidak minum kopi, tapi teh. Adegan-adegan bersuasana temaram pada bagian pertama ini diselingi kemunculan karakter-karakter korban. Arifin menggunakan teknik multilayer sequence untuk menjelaskan keterhubungan masing-masing peristiwa. Metode jump-cut sangat sering dipakai dan cukup berhasil menjukstaposisikan satu peristiwa seperti suasana rapat dan suasana rumah/keluarga para jenderal beriringan adegan Presiden Sukarno di istana. Suasana rapat para petinggi PKI dalam film ini dihadirkan dengan tidak biasa. Salah satu contoh adalah rapat di meja bundar di sebuah rumah ketika karakter-karakter dibiarkan menghalangi kamera. Lalu ada extreme shot dari atas, yang memberikan suasana sangat dalam. Ini juga dilakukan pada rapat-rapat Soeharto dengan para staf di markas Kostrad. High-angle menjadi gaya shot utama. Arifin sepertinya bereksperimentasi dengan konsep voyeuring atau mengintip dari jauh. Ini tentu tidak lepas dari ide “melihat dari jauh sebuah peristiwa” yang belum tentu diyakini kebenarannya oleh sang sutradara. Pada pertemuan-pertemuan tertentu dalam film ini, Arifin terkadang hanya menampilkan bayangan orang-orang serta suasana percakapan dari balik tirai jendela. Secara filmis, gambaran ini sangat puitis. Tentu Arifin ingin menghadirkan keterselubungan peristiwa demi peristiwa yang melatarbelakangi Gerakan 30 September. Secara terselubung, Arifin mengatakan dalam bahasa filmnya bahwa peristiwa-peristiwa ini merupakan sejarah yang masih gelap. G30S pun tidak cerewet untuk menjelaskan karakter para jenderal. Ia cukup menampilkan suasana rumah, kerja, dan orang-orang di sekitar mereka. Arifin sangat disiplin mendesain simbolisasi karakter, misalnya dalam penggambaran sosok D.I. Panjaitan yang tegas dan religius. Ia ditampilkan mendengarkan alunan Requiem Mozart dari piringan hitam di ruang kerja. Musik yang sama terus hadir hingga ia ditembak di depan rumah dan mencapai klimaks ketika muncul adegan putri D.I. Panjaitan mengelap muka dengan darah sang bapak. Pada tokoh Pierre Tendean juga demikian. Kali pertama muncul, Pierre masuk ke kamar sambil membaca surat cinta dari sang kekasih. Musik melankolis membangun suasana adegan itu dengan sangat baik. Pada saat Pierre ditembak di Lubang Buaya, musik yang sama hadir kembali. Penonton diajak kembali pada suasana “membaca surat cinta” yang dihadirkan jauh sebelum pembunuhan. Pada korban lain, Mayor Jenderal Soeprapto, peristiwa kematian pertama-tama ditampilkan melalui semacam nubuat. Digambarkan Soeprapto duduk di meja kerja sambil mengisap cangklong dan menggambar, kemudian sang istri datang. “Masih sakit, Mas?” tanya sang istri. “Kok, malah nanya? Mau minta apa? Justru karena sakit ini enggak bisa tidur. Isap cangklong saja enggak bisa. Tidurlah situ dulu,” jawab sang jenderal. “Gambar apa itu, Mas?” “Ini rencana Museum Perjuangan di Yogya.” “Loh, kok kayak kuburan toh?” Kamera menuju ke gambar. Tanpa dialog selanjutnya, Arifin sangat pandai membangun konstruksi “kematian” dengan dialog yang menyentil dan hangat, seperti minta apa?, situ—sebuah dialog intim antara suami-istri. Juga pada pernyataan istri atas gambar seperti kuburan. Pada titik ini, Arifin menautkan kontras antara keintiman dan “tanda kematian”. G30S jelas menampilkan para jenderal dengan perspektif kepahlawanan versi militer. Mereka digambarkan sebagai orang-orang berkarakter, terhormat, tegas, dan berwibawa. Meski Arifin mencoba mereduksinya secara terselubung dalam beberapa karakter, tetapi suasana kepahlawanan mereka tak bisa dihindarkan. Penculikan dalam Gelap dan Pesta Para Pembunuh Bagian paling mengerikan dalam Pengkhianatan G30S PKI terdiri serangkaian adegan penculikan dan pembunuhan para jenderal. Mobil-mobil militer berjalan dalam kegelapan, tanpa suara. Bingkai gambar berhenti pada lampu truk militer yang berhenti di depan rumah para korban. Ada beberapa cara dan peristiwa dalam adegan penculikan. Ada yang terasa sangat kasar dan keras. Ada pula yang sangat halus dan manis. Ada juga gabungan dari kedua cara tersebut. Adegan penculikan Jenderal Ahmad Yani, misalnya, dibuka dengan gambar pasukan Cakrabirawa ke halaman rumah sang jenderal dan mengetuk pintu. Ketika pintu dibuka seorang pembantu, dengan garang, sang komandan operasi menanyakan keberadaan tuan rumah. Seketika, seorang anak kecil datang meminta untuk bertemu sang ibu kepada pembantu. Sang komandan bicara dengan manis dan sopan dengan sang anak: “Mana bapakmu, Nak?”. “Tidur,” kata sang anak. “Tolong kamu bangunkan Bapak, ya. Bilang ada tamu.” Kemudian Jenderal Yani keluar dengan masih berpiyama. Di sini terjadilan peristiwa kekerasan. Yani menampar para prajurit yang menghardiknya. Ia ditembak dengan senjata mesin. Sang anak melihatnya dari balik meja. Adegan penculikan lain juga hampir sama. Namun, yang menarik, penggambaran para penculik yang turun dari truk dengan gerakan slow-motion tanpa suara. Ada musik khas, yang selalu hadir saat kedatangan para penculik di rumah para jenderal. Jika didengarkan di hadapan penonton generasi 1980-an dan 1990-an di Indonesia, mereka akan segera mengenali musik pada adegan ini, meski tanpa filmnya. Dialog bernada tinggi dan tindakan kekerasan saat interogasi para jenderal dihadirkan tanpa menampilkan muka dan karakter para interogator. Sutradara meramunya dengan visual kaki, tangan, dan muka para jenderal yang tenang dan diam. Di antara itu terdengar sorak-sorai kegembiraan dan caci-maki kepada para jenderal: “Darah itu warnanya merah, Jenderal!” Kemudian, adegan beralih ke suasana di luar rumah penyiksaan. Terlihat para lelaki dan perempuan menari dan menyanyikan lagu “Genjer-genjer.” Ada seorang perempuan mendatangi salah satu korban. Kamera beralih sekilas ke pisau silet di dinding anyaman bambu. Ia mengambilnya. Setelah diletakkan di pipi sang jenderal, silet itu disayatkan. Adegan bergerak ke pembunuhan. Ada tikaman dan tembakan. Peristiwa ini ditutup dengan diseretnya para jenderal ke dalam sebuah lubang sumur. Monumen Nasional, Soeharto, dan Penumpasan Peralihan bab film Pengkhianatan G30S PKI dibuka dengan gambar Monumen Nasional, lalu muncul tulisan: “Bagian II: Penumpasan”. Adegan beranjak ke tokoh sentral, Mayor Jenderal Soeharto. Dimulai dengan suasana rumahnya di pagi hari, Soeharto digambarkan sebagai tokoh yang sangat jeli melihat situasi. Ia diperlihatkan langsung berinisiatif mengambil alih tampuk pimpinan Angkatan Darat. Soeharto juga digambarkan tokoh yang berhati-hati dan memperhatikan detail-detail tindakan yang akan diambilnya. Misalnya, ketika memanggil Kolonel Sarwo Edhie Wibowo, Komandan RPKAD—kini bernama Kopassus, Soeharto memerintahkannya mengambil alih Radio Republik Indonesia. “Usahakan jangan sampai ada korban,” pesan Soeharto. Ini salah satu gambaran yang dipromosikan oleh rezim Orde Baru untuk menunjukkan rasa kemanusiaan yang tinggi dari Soeharto. Arifin tidak terlalu banyak berbuat sesuatu dalam menghadirkan sosok Soeharto sesungguhnya. Adegan demi adegan yang berhubungan dengan tokoh ini selalu ditampilkan sebagai sosok ideal seorang pemimpin. Dalam adegan-adegan rapat koordinasi penumpasan, gambaran Soeharto seperti hanya mengikuti “S.O.P.” dari apa yang digambarkan oleh pemerintah waktu itu sebagai produser film. Dalam satu adegan, Soeharto bak penceramah kepada para perwira lain. Ia mengatakan: “Apa yang disebut Dewan Jenderal itu tidak ada. Sama sekali tidak benar apa yang dikatakan Untung. Menghadapi situasi ini, kita ingin mencari keadilan. Karena jenderal-jenderal kita telah diculik dan dibunuh. Kita merasa terpanggil sebagai prajuri Sapta Marga, karena yang terancam adalah bangsa dan negara. Saya memutuskan untuk menghadapi mereka. Kalau kita tidak hadapi, kita akan mati konyol. Seorang prajurit Sapta Marga harus memilih mati untuk Negara dan Pancasila, bukan mati konyol. Insyaallah, kita akan berhasil menumpas mereka.” Teks di atas adalah dialog terburuk dalam seluruh adegan film ini. Di sinilah letak salah satu “dosa” besar Arifin C. Noer kepada sejarah bangsa dan kebudayaan Indonesia. Meski seharusnya bisa mengolahnya ke dalam bahasa film, ia tidak berbuat apa-apa. Arifin cukup lihai memanfaatkan bahasa filmis pada bagian pertama film ini. Namun, ia kalah oleh sosok Soeharto yang memang tokoh paling sentral sebagai penumpas Gerakan 30 September . Monas dihadirkan beberapa kali dalam bagian kedua film. Bangunan berbentuk phallus—perlambang proyek mercusuar kebanggaan Sukarno—ini dipakai oleh Arifin sebagai penanda “kemenangan”. Tidak seperti film-film yang berlokasi di Jakarta, Monas dalam film ini tidak dipakai sebagai identifikasi lokasi, melainkan sebagai jembatan untuk peristiwa kemenangan penumpasan Gerakan 30 September yang digambarkan dengan baik lewat low-angle shot berlatar langit cerah. Sama seperti bagian pertama, adegan-adegan pada bagian kedua selalu minim dialog. Dialog panjang hanya digunakan ketika Soeharto menyampaikan instruksi dan saat ia menghadap Sukarno. Dialog-dialog ini sengaja dibuat mengambang untuk memberikan ruang interpretasi kepada penonton serta membangun dramatisasi. Kadang-kadang dialog hanya dalam satu kata “Halo” ketika mengangkat telepon. Kemudian loncat ke adegan lain. Penumpasan yang dimaksud dalam bagian kedua film tidak begitu jelas. Di sini lebih banyak menampilkan sosok Soeharto yang memberikan perintah. Para tokoh PKI digambarkan kalut di tempat persembunyiannya. Tidak ada aksi penangkapan. Aksi penumpasan ditutup dengan ditemukan tempat para jenderal dikubur: Lubang Buaya. Pada adegan penggalian ini, sutradara menggunakan suara asli Soeharto yang direkam oleh wartawan RRI pada 3 September 1965. Lagi-lagi elaborasi Arifin sangat terbatas dalam menggunakan footage suara ini dalam gaya bertutur filmis yang baik.  
  
Baca selengkapnya di artikel "Membedah Film 'Pengkhianatan G30S/PKI'", <https://tirto.id/cxxh>

Kumparan.com

**Sejarawan Bicara Kontroversi Film G30S/PKI**

Asvi Warman Adam, sejarawan LIPI, adalah salah satu sosok yang banyak dimintai pendapat mengenai sejarah seputar G30S/PKI. Sejarawan kelahiran Bukittinggi, Sumbar, yang kini berusia 62 tahun ini memang memang banyak melakukan penelitiian seputar konflik tahun 1965.

Saat berbincang dengan **kumparan** (kumparan.com), Kamis (14/9) malam, dari ujung telepon Asvi menyapa ramah. Suara riuh anak kecil terdengar juga di sana, Asvi tengah bersama cucu-cucunya.

"Sekarang memang ada suara-suara untuk memutar kembali (film G30S/PKI)," kata Asvi.

Dia mengaku memang mendengar adanya rencana memutar kembali film legendaris era Orba itu. Asvi sedikit memberi gambaran perihal film yang dibuat pada tahun 1980-an ini, tepatnya 1984, dengan dana Rp 800 juta.

"Sekarang ini kan memang mau 30 September, jadi wajar ada suara yang ingin memutar kembali," tambah Asvi.

Asvi menerangkan, pemutaran film itu dihentikan pada 1998, setelah Soeharto tumbang. Yang Asvi tahu, dan dia sudah mengkonfirmasi, permintaan penghentian pemutaran film itu datang dari beberapa pihak, salah satunya dari purnawirawan AURI.

"Ada saran agar film itu tidak diputar. Saya cek ke Sekjen Purnawirawan AURI saat itu, memang tidak ada surat resmi. Tetapi saya bertemu Marsekal Purnawirawan Saleh Basarah yang pernah juga jadi Dubes di London, dia menyampaikan secara pribadi saran itu ke Menhan Juwono Sudarsono dan Menteri Penerangan Yunus Yosfiah. Film itu dianggap mendiskreditkan AURI, karena Halim dianggap sarang G30S/PKI, padahal Lubang Buaya itu bukan Halim, tapi Pondok Gede. Tempat pembunuhan itu di Lubang Buaya Pondok Gede, bukan Halim," beber Asvi.

Yang Asvi tahu salah satu saran datang dari para Purnawirawan AURI. Pihak lain mungkin juga ada. Asvi juga menerangkan, film selama 4 jam itu tidak layak untuk anak, karena adegan kekerasan dipertontonkan.

"Film itu saja dimulai dengan kata-kata 'darah itu merah, Jenderal', ini kekerasan sudah ditunjukkan," tegas dia.

Dari kacamata sejarawan, Asvi sendiri mengkritisi film itu, antara lain film itu menonjolkan sosok Seoharto, kemudian, dalam rapat-rapat PKI digambarkan Aidit pimpinan PKI merokok, padahal kenyataannya Aidit tidak merokok.

Lalu di film itu peta Indonesia juga sudah memasukkan Timor Timur sebagai bagian Indonesia, padahal baru tahun 1967 Timor Timur masuk Indonesia. Kemudian, berdasarkan data visum, tidak ada pencungkilan mata, pemotongan alat kelamin, atau penyayatan tubuh para perwira TNI AD.

"Kalaupun film itu diputar dengan nonton bareng, ada baiknya diiringi dengan diskusi. Bandingkan dengan film Jagal (mengutip dari Wikipedia, Jagal adalah film dokumenter karya sutradara Amerika Serikat Joshua Oppenheimer. Dokumenter ini menyorot bagaimana pelaku pembunuhan anti-PKI yang terjadi pada tahun 1965-1966)," beber Asvi.

Asvi mengedepankan sisi keilmuwan, dalam melihat fenomena ini. Bagi dia, masyarakat tentu harus diajari berpikir kritis.

"Saya melihat ada banyak versi mengenai gerakan 30 September, dan ini mesti didiskusikan," urainya.

Menutup pembicaraan, Asvi lalu menjelaskan dengan mengutip pidato Nawaksara Soekarno pada sidang MPRS puluhan tahun lalu. Dalam pidatonya, Soekarno menyebut ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya peristiwa G30S/PKI.

"Ada 3 penyebabnya, ada pimpinan PKI keblinger atau kebablasan, ada subversi nekolim atau unsur asing, dan ada oknum yang tidak bertanggung jawab. Sayangnya Soekarno tidak merinci siapa oknum ini," beber dia.

Satu hal lagi, menurut Asvi, mengenai isu bangkitnya PKI, dia sendiri tidak yakin. Di Indonesia, yang berbau PKI itu pasti akan berurusan dengan polisi.

"Itu ngaco saja, kalau PKI melakukan kongres, pasti langsung ditangkap polisi," tutup dia.

Beritagar.id

# Memahami (film) G30S/PKI

Pada akhir September hingga awal Oktober, umumnya peristiwa Gerakan 30 September -yang secara faktual terjadi pada 1 Oktober 1965- selalu diungkit dan dibicarakan kembali dalam intensitas tinggi. Pertama yang harus dipahami dengan apapun yang berkaitan dengan G30S adalah tentang peristiwanya itu sendiri. Dalam historiografi Indonesia, tidak ada satu peristiwa yang penuh kontroversi selain peristiwa G30S.

Tiga hal penting berkaitan dengan peristiwa itu pasca1965 adalah bagaimana peristiwa itu disebut, bagaimana peristiwa itu dimaknai, dan bagaimana peristiwa itu diingat-ingat. Dalam tiga hal itu kontroversi menyeruak kuat, dan dalam dua hal yang pertama itulah pembicaraan akan saya fokuskan.

### Tentang peristiwa

Tentang yang pertama, pascaperistiwa itu penyebutan tentang G30S tidaklah tunggal. Militer -terutama Angkatan Darat (AD)- menyebutnya dengan akronim Gestapu, dimulai sejak 7 Oktober 1965. Sukarno menyebut peristiwa itu dengan akronim Gestok, setidaknya secara resmi pada 13 Desember 1965.

Di sini tampak jelas bahwa militer -AD, terutama kelompok yang antikomunis- memiliki peran besar dan juga kepentingan atas penamaan G30S, dan memunculkan kontestasi antara AD dengan Presiden Sukarno karena AD tidak mau merevisi atau tunduk kepada Presiden dengan akronim Gestok.

Sekalipun diawal terbitan resminya atau terbitan lanjutan edisi internasionalnya menggunakan sebutan netral: G30S, militer (AD) antikomunis mati-matian mempertahankan akronim Gestapu untuk menciptakan atau mempertahankan kengerian atas peristiwa G30S. Akronim Gestapu digunakan untuk mengingatkan publik atas kengerian Gestapo Jerman.

Seiring waktu, seiring menguatnya posisi militer (AD), akronim itu terus mengalami mutasi: mulai berubah menjadi Gestapu/PKI hingga kembali menggunakan frasa awal tetapi berimbuhan, menjadi G30S/PKI. Yang terakhir inilah yang paten dan langgeng.

Proses pengubahan akronim itu menjadi bagian dari politik bahasa yang digunakan militer (AD)/pemerintah Orde Baru untuk melegitimasi pandangan resmi versi mereka atas peristiwa G30S.

Dalam pertarungan akronim itu, Sukarno lebih melihat kronologi peristiwa untuk menetralkan tafsir. Sementara militer (AD) antikomunis tidak peduli dengan kronologi dan lebih ingin menunjukkan langsung -atau mengingatkan, atau menafsirkan- siapa pelaku atas peristiwa itu.

Penggunaan akronim Gestapu, Gestapu/PKI atau G30S/PKI bukan untuk menitikberatkan pada peristiwa, tetapi lebih kepada siapa pelakunya. Dalam narasi militer (AD) jelas bahwa pelaku atas peristiwa itu adalah PKI (Partai Komunis Indonesia).

Narasi ini bersifat final dan tidak bisa diganggu gugat. Maka kontroversi pertama ini -perihal penamaan, dimana militer (AD) mampu menjadi narator tunggal setidaknya hingga akhir Orde Baru- membutuhkan tafsir lanjutan yang kemudian menjadi kontroversi yang kedua: soal pemaknaan.

Militer (AD) antikomunis sesungguhnya melakukan pemaknaan yang berubah atas G30S. Awalnya secara resmi mereka menyebutnya sebagai kudeta. Lalu seiring menguatnya posisi politik AD/Orde Baru, mereka memaknainya sebagai pemberontakan. Dua istilah ini tentu saja berbeda.

Secara umum, istilah kudeta dalam KBBI berarti “perebutan kekuasaan (pemerintahan) dengan paksa”. Kata tersebut merupakan padanan kata dari *coup d'état*, yang dalam kamus Cambrigde berarti “*sudden defeat of a government through illegal force by a small group, often a military one*”.

Berasal dari kata dasar berontak yang bisa berarti “hendak melepaskan diri” atau “melawan pemerintah -kekuasaan dan sebagainya- secara serentak”, kata pemberontakan berarti “penentangan terhadap kekuasaan yang sah”. Kata itu merupakan padanan kata dari *rebellion*, yang dalam kamus Cambrigde berarti “*violent action organized by a group of people who refuse to accept their government’s power and are willing to use force to oppose it*”.

Dalam dua makna G30S itu, militer (AD) antikomunis berusaha untuk menafsir. Tentu saja jika merujuk pada fakta seputar G30S, maka makna yang paling tepat adalah kudeta. Faktanya -dan ini juga yang digunakan sebagai rujukan kuat oleh pengadilan militer (mahmilub)- G30S sebagai gerakan telah melakukan tindakan yang merujuk pada kudeta.

Pertama, mereka membentuk dewan revolusi yang mengambil alih sementara kekuasaan. Kedua, mendemisionerkan kabinet. Dua hal ini secara hukum sudah merujuk kepada kudeta.

Mengapa kemudian harus diubah menjadi pemberontakan? Padahal fakta-fakta lain G30S menunjukkan bahwa -dalam fase-fase yang membingungkan- mereka tidak menentang/melawan presiden, lagi pula tidak diumumkan sedikitpun bahwa mereka membentuk satu kekuasaan baru yang terpisah.

Secara umum pemberontakan selalu melekat dengan tindakan perlawanan terhadap kekuasaan dan pembentukan kekuasaan tandingan. Sementara G30S tidak menunjukkan gejala itu. Oelha karena itu istilah pemberontakan semestinya tidak dipergunakan.

Namun militer (AD) antikomunis membutuhkan alasan kuat untuk memosisikan diri sebagai penyelamat bangsa dan negara. Itu berarti makna G30S harus berskala nasional. Pilihan pemaknaan G30S sebagai pemberontakan sangat logis untuk hal ini, sekalipun bertentangan dengan fakta-fakta yang ada.

*Framing*atas peristiwa itu sebagai pemberontakan sangat penting untuk disampaikan ke publik. Untuk itulah segala produk diciptakan demi memperkuat hal ini. Film menjadi salah satu media propaganda untuk hal tersebut. Dari sinilah mengapa film *Pengkhianatan G30S/PKI*dibuat.

### Soal film

Propaganda -jika itu tentang hal-hal yang negatif- umumnya tetap simplistis dan mampu menciptakan “histeria” publik. Film *Pengkhianatan G30S/PKI* diciptakan sebagai bagian propaganda Orde Baru untuk memantapkan dua hal yang telah dibahas di depan: penunggalan atas penamaan dan pemaknaan peristiwa G30S.

Film, secara umum kecuali dokumenter, bagaimanapun harus dipandang sebagai “sumber sekunder”. Ia tidak boleh diperlakukan sebagai “sumber primer”, sebagai rujukan utama untuk memahami satu peristiwa -apalagi peristiwa sejarah.

Namun sebagai propaganda, film bisa dimunculkan sebagai rujukan utama. Dalam konteks itu, dilakukan oleh agen penopang yang berkepentingan, film diperlakukan seolah memiliki otoritas untuk menunjukkan “kebenaran” yang mesti diamini oleh publik. Di sinilah posisi film *Pengkhianatan G30S/PKI*.

Tentu saja film ini digarap dengan serius oleh Arifin C Noer sebagai sutradara, dengan melakukan riset, wawancara dan rekonstruksi peristiwa yang tidak main-main. Tetapi jelas bahwa film ini didanai oleh negara serta demi kepentingan negara, maka adegan-adegan di dalamnya harus sesuai dengan versi negara (pemerintah Orde Baru/militer AD).

Dalam titik tertentu, mereka mengembangkan *framing*dengan imajinasi dan menyuguhkan adegan surealistis. Adegan “pesta-pesta”, terutama tari-tarian -yang kemudian lebih dikenal sebagai harum bunga- menjadi satu bentuk adegan surealistis dalam film.

Simplifikasi film ini sebagai propaganda hadir dalam adegan-adegan yang membentuk *framing*bahwa PKI yang memanfaatkan militer AD melakukan tindakan kekerasan –seperti ditunjukkan pada bagian awal film dengan adegan Peristiwa Kanigoro serta detil sadisme penculikan dan pembunuhan para perwira, dan bahwa militer (AD) sebagai “pahlawan” yang mampu memperbaiki keadaan.

Propaganda simplistis memang secara alamiah harus menghadirkan dua hal dikotomis: “hitam-putih”, “benar-salah”, “baik-buruk”. Dengan demikian pesan propaganda itu akan merasuk ke dalam ingatan publik.

Dari sana konstruksi kebenaran dibentuk sesuai kepentingan dan publik akan mengamininya. Sejak film *Pengkhianatan G30S/PKI* dipublikasikan pada 1984 hingga akhir 1997 –yang permohonan penghentian pemutaran ini dilakukan oleh AU, film ini telah berhasil mempengaruhi ingatan dan menjadi rujukan untuk melihat “kebenaran” atas G30S.

Film ini menjadi bagian penting dari apa yang disebut Louis Althusser, sebagaimana Wijaya Herlambang jelaskan dalam bukunya *Kekerasan Budaya*, sebagai aparatus ideologi negara: diciptakan sebagai produk budaya untuk menancapkan wacana antikomunis kepada publik.

Sebagai produk aparatus ideologis, sekalipun penopang-penopang kuatnya telah “hilang”, ingatan yang telah tertancap itu tidak mudah untuk ikut hilang. Entah disetujui maupun dibantah, ia akan tetap mengapung dalam kesadaran publik dan sekali waktu akan bisa digunakan kembali oleh kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan atas itu.

Tidaklah mengherankan jika kelompok tertentu memiliki kepentingan utama atas film ini untuk mengembalikan “kebenaran” yang dahulu -sebelum Reformasi- menempatkan mereka dalam posisi selalu “putih”, selalu “benar”, selalu “baik” dan bahkan selalu “pahlawan”.

Sejarahlengkap.com

Daerah.sindonews.com

# Soe Hok Gie dan Pembantaian Massal PKI 1965-1966

**SOE HOK GIE**merupakan sosok yang penuh kontradiksi. Dia gencar mengkritik Partai Komunis Indonesia (PKI), tetapi menjadi orang pertama yang memprotes keras terjadinya pembantaian massal terhadap anggota dan simpatisan PKI tahun 1965-1966.   
  
Tidak hanya itu, Soe Hok Gie juga turun ke lapangan dan mengumpulkan data-data mengenai hal tersebut yang kemudian ditulis menjadi dua serial artikel dengan nama samaran Dewa. Tulisannya sangat tajam, dan kaya akan detail di lapangan.   
  
Artikel Gie tentang pembantaian massal itu pertama kali diturunkan oleh Mahasiswa Indonesia Jawa Barat, pada Minggu II Desember dan Minggu III Desember 1967, dengan judul "Di Sekitar Peristiwa Pembunuhan Besar-Besaran di Pulau Bali."

Dalam laporannya, Gie menyatakan, tulisannya itu bukan untuk membela PKI atau membenarkan cara-cara yang PKI lakukan saat menghancurkan lawan-lawan politiknya. Pembelaan Gie ditujukan kepada penegakan hukum, keadilan, dan kemanusiaan.  
  
Menurut pengamatan Soe Hok Gie, Bali sebelum 1965-1966, bukan daerah yang strategis. Kepulauan ini tidak punya kepentingan politik, ekonomi, dan militer yang menentukan perebutan kekuasaan. Tetapi tidak demikian menurut Presiden Soekarno.  
  
Bagi Soekarno, Bali merupakan ibu kota Republik Indonesia (RI) kedua setelah Jakarta. Di Bali, Soekarno suka menghabiskan banyak waktu di Tampak Siring. Selain itu, Bali juga memiliki makna sentimentil, karena ibunda Soekarno orang Bali.  
  
Pendukung Soekarno di Bali cukup besar. Gubernur Bali Suteja yang merangkap jabatan Kepala Pepelrada adalah anak didik Soekarno. Di kalangan militer, Soekarno juga memiliki banyak pengikut dan orang-orang setia, serta loyal kepadanya.   
  
Proses Nasakomisasi di Bali berjalan cukup lancar. Hampir setiap badan dan perwakilan pemerintah berhasil di Nasakom-kan. Hingga sebelum kudeta militer 1 Oktober 1965, situasi di Bali berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki Soekarno.  
  
Situasi itu tidak berubah sebulan setelah kudeta. Keadaan mulai memanas setelah kabar mengenai adanya pembantaian massal di Jawa Tengah dan Jawa Timur sampai ke Bali. Pembantaian dimulai dengan provokasi anggoat PNI Dewa Made Wedagama.   
  
Dalam propagandanya, dia mengatakan, Tuhan menyetujui pembantaian terhadap orang-orang PKI, dan hukum tidak akan menindak mereka yang melakukannya. Warga juga dihasut untuk melakukan penjarahan-penjarahan terhadap semua harta benda milik PKI.   
  
Dengan propaganda tersebut, orang-orang PNI yang awalnya mendukung Nasakom mulai berbalik arah mengecam PKI. Saat itu, Soekarno masih menjadi Presiden. Namun, dia sudah tidak punya kekuatan. Semua telah dikendalikan Jenderal Soeharto.   
  
Dengan melakukan serangkaian pembantaian massal, kelompok Nasakom (dari unsur Nasionalis) di Bali ingin menunjukkan kepada dunia luar, terutama mereka yang berada di Jakarta, bahwa mereka yang di Bali benar-benar anti-PKI dan pro-Pancasila.   
  
Sejak itu, pasukan-pasukan pertikelir yang terkenal dengan seragam hitamnya, dengan persenjataan pedang, pisau, pentungan, dan senjata api, mulai melakukan pembakaran-pembakaran rumah PKI sebagai warming up untuk tujuan yang lebih bengis.   
  
Selama tiga bulan, Bali yang indah menjadi neraka penyembelihan-penyembelihan. Menurut perkiraan yang paling konservatif, pembunuhan-pembunuhan itu telah menelan korban jiwa 80 ribu, terdiri dari orang tua, muda, laki, dan perempuan.   
  
Rumah-rumah yang dibakar dan harta benda yang dijarah masih belum dihitung jumlahnya. Begitupun dengan kasus pemerkosaan-pemerkosaan terhadap mereka yang dituduh Gerwani. Ironisnya, perbuatan terkutuk itu dicontohi pemuka partai setempat.  
  
Contoh paling monumental adalah yang dilakukan tokoh PNI di Negara Widagda. Pria ini adalah adik dari Wedastra Suyasa, seorang tokoh PNI Bali yang menjadi anggoat DPR GR pusat. Belasan wanita yang dituduh Gerwani telah dijinahinya.   
  
Tiga orang korban pemerkosaan Widagda kemudian melaporkan apa yang dialaminya ke meja hijau. Widagda lalu diseret ke muka sidang, dan dijatuhi vonis penjara tiga tahun oleh Pengadilan Negeri di Negara. Hukuman yang sangat tidak setimpal.   
  
Pembantaian massal di Bali jelas meninggalkan luka mendalam dan kesedihan. Berapa banyak janda yang ditinggal mati para suami mereka dan anak-anak yang jadi yatim, maupun yang ditinggal mati oleh kedua orangtuanya dalam jagal-jagal itu.   
  
Dalam keseimpulannya, Soe Hok Gie menyatakan, pemerintah dan pejabat terkait telah membiarkan pembantaian-pembantaian di Bali terjadi berlarut-larut hingga menimbulkan korban jiwa yang sangat banyak dari kalangan rakyat tidak berdosa.   
  
Para pejabat-pejabat setempat tidak melakukan apa-apa dalam peristiwa itu. Bahkan dalam banyak kasus, justru merekalah yang memulai dan memberi contoh kepada rakyat untuk melakukan penyembelihan-penyembelihan sangat keji tersebut.   
  
Selain di Bali, Soe Hok Gie juga menyorot kasus pembantaian massal anggota dan simpatisan PKI di Purwodadi, Jawa Tengah. Dia bahkan terjun langsung ke lapangan dan melihat sendiri bagaimana amuk massa berlangsung sangat mengerikan saat itu.   
  
Untuk mencegah lebih banyak korban, Soe Hok Gie banyak melakukan tindakan advokasi untuk penghentian tindakan-tindakan di luar batas kemanusiaan tersebut. Dia juga banyak melakukan kontak dengan para pejabat militer di daerah dan pusat.   
  
Simpati Soe Hok Gie tidak hanya kepada para korban pembantaian massal, tetapi juga terhadap para tahanan 1965 dan stigma yang dilekatkan kepada mereka. Berbagai peristiwa ini rupanya membuat Soe Hok Gie merasa sangat dihantui.   
  
"Tentang nasib tahanan 65, saya juga sedang dihantui oleh problem lain. Yaitu sejumlah akibat dari pembunuhan massal di Jawa Tengah, dan Jawa Timur, serta Bali terdahulu. Jumlah yang dibunuh atas nama Pancasila kira-kira 300 ribu," katanya.   
  
Sedangkan mereka yang menjadi korban dari peristiwa itu, menurut perkiraannya mencapai angka satu juta orang. Jumlah itu termasuk anak-anak yang tidak tahu apa-apa, tetapi dimusuhi oleh masyarakat, dan akan menjadi pembenci masyarakat.

Terlebih setelah Gie membaca surat pembaca Kompas pada 24 April 1969 tentang perlunya surat G30S atau Surat Tanda Bukti Tidak Terlibat Gestapu untuk anak-anak SD Kelas V dan VI. Perlu diketahui, untuk membuat surat itu tidak gratis.   
  
Menurut Gie, para siswa SD itu tidak tahu apa-apa tentang G30S dan komunisme. Bahkan dari 22 juta PKI yang klaim sebagai anggota, hanya beberapa ribu saja yang mengerti Marxisme-Leninisme. Sedangkan sisanya banyak yang ikut-ikutan saja.   
  
Dengan tegas Soe Hok Gie mengatakan, mereka yang benar-benar terlibat G30S harus ditindak tegas. Tetapi kepada mereka yang hanya ikut-ikutan PKI harus dikembalikan kepada masyarakat, tanpa memakai surat bebas G30S yang memberi stigma buruk.   
  
Selain memperlihatkan keprihatinannya yang besar terhadap anggota dan simpatisan PKI yang menjadi korban penangkapan, penyiksaan, dan pembantaian massal, Soe Hok Gie juga banyak mengkritisi pemerintahan Orde Baru Presiden Soeharto.   
  
Sikap kritis Gie terhadap pemerintah Orde Baru yang ikut dibidaninya juga bagian dari bentuk kontradiksi pria kelahiran 17 Desember 1942 ini. Menurutnya, Orde Baru telah bertindak di luar batas dengan berusaha mengontrol pemikiran masyarakat.   
  
Sejak 1 Oktober 1965 hingga 6 Desember 1965, semua dokumentasi buku telah musnah dibakar. Termasuk 5.000 judul buku dan beberapa ton koleksi surat kabar Pramoedya Ananta Toer yang dia kumpulkan atas jerih payah sendiri selama 15 tahun.   
  
Sampai di sini ulasan singkat Cerita Pagi tentang Soe Hok Gie dan Pembantaian Massal 1965-1966 diakhiri, semoga memberikan manfaat.   
  
Sumber Tulisan:\* Robert Cribb, The Indonesian Killings, Pembantaian PKI di Jawa dan Bali 1965-1966, Mata Bangsa, Cetakan Kedua, Oktober 2003. \* Soe Hok Gie, Catatan Seorang Demonstran, LP3ES, Cetakan Kedelapan, Juni 2005. \* Rudy Badil, Luki Suitrisno Bekti, Nessy Luntungan R, Soe Hok Gie Sekali Lagi, Buku, Pesta dan Cinta di Alam Bangsanya, KPG, Cetakan Kedua, Januari 2010.